



Proyek Sodetan Ciliwung Molor Lagi

Tuntutan harga tanah yang diajukan warga dinilai tak masuk akal.

JAKARTA — Kepala Balai Besar Ciliwung-Cisadane Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Teuku Iskandar, menyatakan proyek sodetan Sungai Ciliwung terpaksa molor lagi.

Target perampungan proyek, yang sebelumnya pada akhir Maret 2015, digeser menjadi akhir tahun ini. Sebab, pembebasan lahan yang masih bermasalah dengan warga sekitar menghambat pekerjaan situs *inlet* di Bidara Cina, Jakarta Timur.

Padahal sodetan tersebut merupakan pintu masuk mengalirnya air dari Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur. "Realisasi pekerjaan baru rampung 11 persen dari target 64 persen per Januari 2015," kata Iskandar.

PT Wijaya Karya sebagai kontraktor, tutur Iskandar, akhirnya mengambil solusi pekerjaan alternatif, yaitu mulai mengebor gorong-gorong kembar berdiameter 3,5 meter dari situs outlet di samping Kanal Banjir Timur, Kebon Nanas. "Empat cincin gorong-gorong yang masing-masing sepanjang 2,5 meter sudah masuk secara horizontal pada pekan lalu," ujarnya.

Selain itu, Iskandar menambahkan, bor raksasa yang dibeli PT Wijaya Karya memiliki kemampuan menembus tanah sepanjang 600 meter. Terhitung sejak pengeboran dimulai, kata dia, mata bor akan muncul di situs *arriving shaft* titik tengah sodetan di Jalan Otista III setelah 120 hari. "Berarti, bila pengeboran tuntas sampai Jalan Otista III, pekerjaan baru rampung 50 persen," kata dia.

Camat Jatinegara, Syofian Thaher, mengatakan molornya proyek senilai Rp 492,6 miliar ini disebabkan oleh alotnya nego-

siasi dengan warga Bidara Cina. Mereka menuntut pembayaran tanah dan bangunan dengan harga tinggi.

"Mereka sepertinya tak punya sertifikat resmi kepemilikan tanah, tapi ngotot tak mau digusur," ujar Syofian, kepada *Tempo*, kemarin. Menurut dia, ada 299 peta bidang di Bidara Cina yang harus dibebaskan. Namun, hingga saat ini, baru 48 peta bidang yang telah diukur Panitia Pembebasan Tanah Jakarta Timur per Januari 2015. Adapun sisanya belum diukur karena ditolak warga setempat dengan beragam alasan, dari dugaan kecurangan yang dilakukan tim pengukur hingga belum disampaikannya harga ganti untung oleh pemerintah.

Sugiyanto, 43 tahun, warga Bidara Cina, mengaku tidak memiliki sertifikat kepemilikan tanah. Klaim atas tanah dan rumahnya, yang seluas 3 x 6 meter dan bertingkat dua, hanya didasari akta jual-beli yang ia peroleh pada 1980. "Waktu itu belinya masih murah," kata dia.

Meski tak punya sertifikat tanah, ia berkeras menuntut harga ganti untung atas tanah dan bangunannya dengan angka tinggi. "Paling tidak 10 kali lipat dari nilai jual obyek pajak, yang sekitar Rp 2,7 juta per meter persegi," tuturnya.

Menurut dia, besaran harga ganti untung itu ditetapkan warga setelah mengetahui bahwa harga tanah stasiun pengisian bahan bakar umum di Jalan Otista Raya mencapai Rp 50 juta per meter persegi. "Yang dituntut warga dinilai tak berlebihan," kata dia.

Wali Kota Jakarta Timur, Bambang Musyawardhana, mengatakan pemerintah sedang meneliti kepemilikan tanah di Bidara Cina. Penelitian tersebut dilakukan di bawah kendali Badan Pertanahan Nasional. "Biar semuanya jelas," ujar dia.

Menurut Bambang, tuntutan harga tanah yang diajukan warga

tak masuk akal. Warga Bidara Cina berhak bernegosiasi soal biaya ganti untung yang mereka kehendaki, tapi harus berlandaskan asas kepatutan. "Harga itu sudah dapat membeli tanah di kawasan premium Jakarta," katanya.

● RAYMUNDUS RIKANG